

BAB III

KRISIS TENAGA KERJA DI JEPANG

Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia dimana memiliki perekonomian terbesar ke tiga di dunia. Selain itu, Jepang menduduki posisi ketiga dalam industri manufaktur mobil dan elektronik serta masuk dalam daftar negara-negara inovatif utama di dunia. Di era saat ini, pesaing utama Jepang merupakan Tiongkok dan Korea Selatan yang merupakan tetangganya sendiri. Di samping memiliki persaingan dengan negara tetangganya, Jepang pun memiliki tantangan yang lebih penting yang mana muncul di dalam negaranya sendiri. Tantangan itu berupa kekurangan tenaga kerja yang diakibatkan oleh munculnya krisis demografi di Jepang.

A. Sejarah Industrialisasi di Jepang

Jepang merupakan negara non-Barat pertama yang dapat setara dengan negara-negara Barat dan berhasil dalam industrialisasi. Industrialisasi sendiri merupakan perkembangan sektor industri di suatu negara atau wilayah dimana terjadi proses perubahan sosial dan ekonomi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi dapat dimaknai juga sebagai suatu proses dimana masyarakat di suatu negara terfokus terhadap perkembangan ekonomi yang erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Industrialisasi atau revolusi industri sendiri muncul pertama kali di Britania Raya pada sekitar akhir tahun 1700-an dan menyebar ke beberapa negara di Eropa dan Amerika seperti Belgia, Perancis, Jerman dan Rusia. Dalam revolusi industri, terdapat beberapa sektor industri yang secara signifikan mengalami transformasi yaitu tekstil, transportasi, komunikasi dan perbankan (History Editors, 2009).

Keberhasilan Jepang sebagai negara dengan perekonomian yang maju dan menjadi negara industri seperti

saat ini tidak dapat terlepas dari sejarah panjangnya. Perkembangan sejarah dan ekonomi Jepang sendiri dapat diringkas dalam tiga periode utama yaitu Periode Edo (1603-1868), Periode Pra Perang (1868-1945), dan Periode Pasca Perang (1945-sekarang). Pada periode Edo—selama kurang lebih 220 tahun—Jepang menjalankan politik isolasi atau *sakoku*¹. Pada tahun 1854, kedatangan angkatan laut Amerika Serikat di bawah Laksamana Matthew Perry di Jepang memaksa Jepang untuk menandatangani dan mematuhi *Kanagawa Treaty*². Pada tahun 1868, Keshogunan Tokugawa kehilangan kekuasaannya dan kaisar dipulihkan ke posisi tertinggi dimana kemudian dikuasai oleh Kaisar Meiji (Sari, Isjoni, & Kamaruddin, 2017) (Victoria and Albert Museum, 2016).

Pada Periode Pra Perang, muncul gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Kaisar Meiji—dikenal dengan Restorasi Meiji (1866-1869). Di bawah kekuasaan Kaisar Meiji, Jepang menganut ide-ide dan teknologi Barat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan Jepang dengan negara-negara Barat. Pada generasi pertama industrialisasi (1877-1900), industri makanan setidaknya menyumbang 40% dan tekstil 35% dari pertumbuhan ekonomi Jepang. Setelah Jepang berhasil melampaui barang-barang konsumsi, Jepang pun mulai tertarik untuk menguasai pekerjaan berat. Jepang juga mulai menata kembali negaranya dengan memperbaiki infrastruktur, membangun mesin, kapal, lokomotif, jalur kereta api, pelabuhan dan galangan kapal. Tujuan Jepang untuk menjadi negara industri modern tidak akan tercapai tanpa bakat, tekad dan kerja keras dari masyarakat Jepang sendiri (Landes, 1998).

¹ Politik isolasi atau *sakoku* merupakan suatu kebijakan dimana Jepang menutup dirinya terhadap pengaruh dunia luar dengan membatasi hubungan dan perdagangan antara Jepang dengan negara lain serta mengurangi kontak dengan dunia luar.

² *Kanagawa Treaty* merupakan perjanjian pertama antara Amerika Serikat dan Keshogunan Tokugawa yang mana menandai berakhirnya kebijakan politik isolasi nasional Jepang dengan membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate ke kapal-kapal Amerika Serikat. *Kanagawa Treaty* ini juga mempercepat penandatanganan *Townsend Harris Agreement* yang mana membangun hubungan diplomatik Jepang dengan kekuatan Barat lainnya.

Restorasi Meiji membawa perubahan besar bagi Jepang dimana Jepang berhasil memiliki pemerintahan birokratis yang sangat tersentralisasi, konstitusi yang membentuk parlemen terpilih, sistem transportasi dan komunikasi yang berkembang dengan baik, populasi yang berpendidikan tinggi tanpa batasan kelas feodal, sektor industri yang mapan dan berkembang pesat berdasarkan teknologi terbaru, serta pasukan angkatan darat dan laut yang kuat (Asia for Educators, Columbia University, 2009). Proses industrialisasi dan modernisasi di Jepang pun berjalan dengan sangat cepat dimana pada awal abad ke-20, Jepang menjadi semakin militeristik dan ekspansionis yang mana banyak menduduki beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

Periode Pasca Perang (1945-sekarang) merupakan periode pertumbuhan utama perekonomian Jepang. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Jepang mengalami hiperinflasi dimana disebabkan oleh meningkatnya permintaan terkait rekonstruksi nasional akibat perang yang diikuti dengan kapasitas produksi yang rendah. *The 1956 Economic White Paper* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi karena permintaan berbasis pemulihan telah berakhir dan pertumbuhan sejak saat itu akan didorong oleh modernisasi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga yang meningkat di Jepang karena standar kehidupan pun mulai meningkat (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016).

Antara tahun 1955 dan 1975, industri sekunder³ dan tersier⁴ berkembang dengan pesat dan rasio output dari industri primer⁵ terhadap total output ekonomi berkurang secara dramatis dari 41% menjadi hanya 14%. Sebaliknya,

³ Industri sekunder (manufaktur) merupakan industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Contohnya seperti pemintalan benang sutera, komponen elektronik, daging kaleng dan sebagainya.

⁴ Industri tersier (jasa) merupakan industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan sebagainya.

⁵ Industri primer (ekstraktif) merupakan industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya seperti hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

proporsi di sektor sekunder dan khususnya industri tersier meningkat pada periode ini. Industrialisasi yang sangat cepat pun disertai dengan perubahan status pekerjaan para pekerja. Proporsi wiraswasta dan pekerja keluarga menurun, dan sebaliknya, bahwa karyawan meningkat dari 46% menjadi 69% antara tahun 1955 dan 1975. Dengan demikian, masyarakat Jepang kemudian disebut *sarariman shakai* atau masyarakat yang berpusat pada karyawan selama periode tersebut (Atoh, 2008).

Selama tahun 1960-an, Jepang mengurangi pengeluarannya untuk pertahanan dan fokus pada pengembangan industrinya. Pada tahun 1959, Tokyo yang terpilih sebagai kota tuan rumah untuk Olimpiade 1964, menimbulkan ledakan di sektor konstruksi swasta dengan berbagai proyek skala besar yang membutuhkan penyelesaian tepat waktu untuk Olimpiade seperti Shinkansen berkecepatan tinggi, jalur kereta api, jalan bebas hambatan, dan lain sebagainya (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016). Pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat pesat dengan peningkatan 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an dan 4% pada tahun 1980-an. Pada sekitar tahun 1970-an, perekonomian Jepang telah matang dan terus berkembang pada tingkat pertumbuhan yang moderat. Dengan perekonomian yang semakin kuat, muncul masyarakat yang makmur (Atoh, 2008). Perkembangan ekonomi Jepang yang pesat dari tahun 1970-an hingga 1980-an membuat Jepang menjadi negara dengan perekonomian yang super.

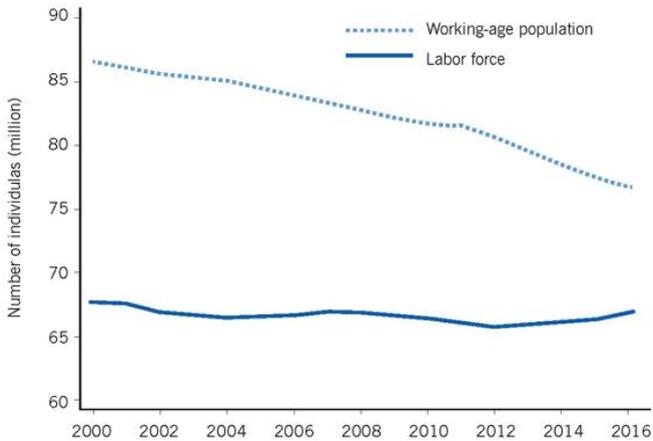
Perkembangan ekonomi Jepang tidak dapat bertahan lama karena selama tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Jepang jauh lebih lambat daripada negara-negara maju lainnya. Hal ini dikarenakan Jepang yang menghadapi 'Lost 20 Years' dimana ekonomi Jepang berada jatuh pada ekonomi stagnasi yang berkepanjangan, meskipun diselengi dengan beberapa periode pemulihan. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, perekonomian Jepang memasuki fase pemulihan pada tahun 2009. Jepang pun harus mengatasi kemerosotan

sementera yang terjadi setelah *the Great East Japan Earthquake* pada tahun 2011 (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016). Pada zaman modern ini, Jepang lebih memfokuskan industrinya pada pembuatan kendaraan hybrid, robot dan instrumen optik. Hal ini dikarenakan meskipun Jepang merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang maju, namun lambat laun negara-negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan mulai mengejar Jepang dan kompetisi pun tidak dapat dihindari.

B. Ketersediaan Tenaga Kerja di Jepang

Jepang memang masih menduduki negara dengan perekonomian yang tinggi di dunia, namun nyatanya Jepang memiliki tantangan lain yang lebih serius. Penyusutan jumlah populasi serta Jepang yang muncul sebagai pelopor tren global dalam penuaan populasi menunjukkan permasalahan yang sedang dihadapi Jepang. Perubahan demografis ini begitu mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu di Jepang, terutama di kalangan wanita dengan menambah permintaan akan tenaga kerja pada industri layanan kesehatan.

Pada sekitar pertengahan tahun 1990-an, Jepang mengalami penurunan yang tajam pada jumlah populasi usia kerjanya (usia 15-64 tahun). Jika dilihat dari Gambar 3.1, jumlah populasi usia kerja di Jepang mengalami penurunan kurang lebih 10 juta antara tahun 2000 dan 2016 yaitu dari 86,6 juta orang menjadi 76,7 juta orang. Jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya, kecepatan penurunan Jepang merupakan yang tercepat. Meskipun terjadi penurunan tajam pada populasi usia kerjanya, ukuran angkatan kerja Jepang masih dalam kategori relatif stabil. Pada periode tersebut, hanya terjadi penurunan sekitar 1 juta dari 67,7 juta orang menjadi 66,7 juta orang. Namun, angkatan kerja Jepang mulai mengalami peningkatan antara tahun 2012 hingga 2016 (Kawaguchi & Mori, 2017).



Source: Authors' own compilation based on data from the Japanese Labor Force Survey. Online at: <https://www.e-stat.go.jp>

Gambar 3. 1 Populasi Usia Kerja (15-64 tahun) dan Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber: (Kawaguchi & Mori, 2017)

Meskipun Jepang merupakan salah satu negara maju, namun cukup tertutup untuk menerima pekerja asing bekerja di Jepang. Setidaknya, Jepang hanya memiliki 2% pekerja asing yang bekerja di Jepang jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Jumlah ini relatif cukup rendah, dimana jumlah pekerja asing di Amerika Serikat mencapai 5% dan di Uni Eropa jumlahnya mencapai 10%. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran penduduk Jepang sendiri dengan kehadiran tenaga kerja asing yang terlalu banyak yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan menciptakan pasar tenaga kerja yang murah.

Motoshige Ito, seorang profesor ekonomi di University of Tokyo berpendapat bahwa, “*Objectively speaking, Japan cannot make up for its labor shortage by itself in the long run.*” Ito pun juga mengatakan bahwa “*In the era of economic globalization, domestic manpower will shift to stronger industries, and we need to supply laborers from*

overseas in weaker industries” (Bilaterals.org, 2006). Pendapat Motoshige Ito ini sesuai dengan apa yang sedang terjadi di Jepang dimana Jepang semakin bergantung pada tenaga kerja asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor keterampilan ekonomi yang lebih rendah. Permintaan akan pekerja migran meningkat, tidak terkecuali di sektor konstruksi yang mana disebabkan karena Jepang yang sedang bersiap untuk menyelenggarakan *the Tokyo Summer 2020 Olympics* dan *the Tokyo Summer 2020 Paralympics*. Pada tahun 2014, pemerintah Jepang dilaporkan memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar 150,000 pekerja antara 2015 dan 2020 untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan sektor (Hayakawa & Barnes, 2017).

Meskipun Jepang bersikap sangat keras pada imigrasi, namun nyatanya Jepang telah lama menyambut pekerja asing dengan bakat yang tinggi, *trainee* dan mahasiswa asing. Jumlah pekerja asing di Jepang pun mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 680.000 orang dan pada tahun 2017 jumlahnya naik menjadi 1,28 juta orang. Di antara negara-negara OECD, Jepang berada di peringkat keempat dalam hal arus masuk populasi asing (Masutomo, 2018). Penawaran dan permintaan antara orang asing yang mencari pekerjaan dan perusahaan lokal yang menawarkan pekerjaan berkembang begitu pesat. Instansi Pemerintah Jepang berperan dalam memberikan informasi tentang rekrutmen dari perusahaan lokal kepada para imigran yang tinggal di Jepang untuk mendapatkan pekerjaan (Tong, 2016).

Pemintaan akan tenaga kerja di Jepang meningkat pada level tertinggi dalam 24 tahun terakhir dengan adanya upaya pemerintah Jepang mengembalikan perekonomian Jepang. Tak hanya itu, tingginya permintaan akan tenaga kerja juga didorong dengan adanya pembangunan kembali infrastruktur negara Jepang setelah bencana tsunami pada tahun 2011 serta ledakan konstruksi menjelang *the Summer 2020 Olympics* dan *the Summer 2020 Paralympics*. Hal ini pun berpengaruh pada meningkatnya angka pekerja asing

hingga 40% sejak tahun 2012, dengan lebih dari sepertiganya berasal dari Tiongkok, lalu diikuti oleh orang Vietnam, Filipina dan Brazil (Sieg & Miyazaki, 2016).

Selain terjadi penurunan terhadap populasinya, jajaran populasi usia kerja di Jepang (usia 15 hingga 65 tahun) akan turun dari level saat ini dari 81,7 juta menjadi 44,3 juta, penurunan 37,6 juta atau 45,9% (Nippon Communications Foundation, 2017).

C. Kekurangan Tenaga Kerja di Jepang

Saat ini, Jepang tengah menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja atau krisis tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja yang dihadapi Jepang merupakan perpanjangan masalah dari perubahan demografi Jepang yang signifikan. Kekurangan tenaga kerja ini disebabkan karena perubahan demografi Jepang yang berupa penyusutan dan penurunan jumlah populasi atau penduduk di Jepang. Perubahan demografi Jepang juga menyebabkan berbagai masalah serius seperti pengurangan jumlah populasi usia kerja, peningkatan rasio ketergantungan, keadaan dalam sistem pensiun publik, penurunan ekonomi dan hilangnya vitalitas masyarakat (Usman & Tomimoto, 2013). Pada perkembangannya, jumlah populasi Jepang yang kian menurun diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga menurun.

Piramida penduduk tahun 1950 menunjukkan bahwa Jepang memiliki piramida berbentuk standar dengan basis yang luas. Namun, bentuk piramida ini telah berubah secara dramatis karena tingkat kelahiran dan tingkat kematian telah menurun. Pada tahun 2016, jumlah populasi lansia (65 tahun keatas) adalah 34,59 juta, yang mana merupakan 27,3% dari total populasi (yaitu, satu dari setiap empat orang) dan menandai rekor tinggi. Di Jepang, periode ketika persentase orang berusia 65 tahun atau lebih tua melebihi 10% adalah 1985, tetapi ketika melihat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ini terjadi pada tahun 1940 di Perancis, 1950 di Swedia,

1965 di Italia dan 1975 di Amerika Serikat, yang semuanya lebih awal daripada di Jepang. Namun, pada tahun 2015, persentase populasi penduduk berusia 65 tahun atau lebih tua di Jepang yaitu 25,6%, melebihi Amerika Serikat (14,8%), Perancis (19,1%), Swedia (19,9%), dan Italia (22,4%) menunjukkan bahwa masyarakat yang menua di Jepang berkembang pesat dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, 2017).

Berdasarkan data dari Ministry of Internal Affairs and Communications, jumlah populasi pekerja Jepang pada tahun 1960 adalah 45,11 juta orang, namun pada tahun 2014 jumlah ini meningkat menjadi rata-rata 65,87 juta orang. Sedangkan, pada tahun 1960, rasio angkatan kerja⁶ Jepang adalah 69,2%, tetapi menurun menjadi 59,4% pada tahun 2014 (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016).

Jepang merupakan salah satu negara dengan penuaan masyarakat tercepat di dunia, dengan orang-orang berusia 65 tahun atau lebih tua berjumlah lebih dari satu per empat jumlah populasi Jepang—suatu bagian yang diperkirakan akan meningkat dengan cepat ke depan. Untuk mengatasi peningkatan kekurangan tenaga kerja yang diakibatkan penuaan ini, pemerintah sejak tahun 1990-an telah beralih ke imigrasi, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil dan sebagian besar tanpa debat publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sementara pemerintah nasional telah mengklaim untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja pekerja lanjut usia dan wanita atas peningkatan imigrasi, tenaga kerja asing penduduk sebenarnya terus meningkat, tumbuh 40% sejak tahun 2013 saja. Politisi tetap enggan, bagaimanapun, untuk menarik perhatian pada pertumbuhan ini atau memberikannya label hasil keputusan kebijakan eksplisit (Green, 2017).

⁶ Ratio of labor force atau rasio angkatan kerja merupakan rasio terhadap jumlah populasi umum yang berusia 15 tahun ke atas.

Pemerintah Jepang mengalami dilema dimana pada satu sisi, Jepang mendorong adanya imigrasi, namun di satu sisi menolak untuk mengakui tindakan tersebut yang mana dikarenakan kekhususan konteks Jepang. Masyarakat Jepang sangat mempertahankan persepsi yang kuat tentang homogenitas etnis dan budaya, dimana masyarakatnya tidak dapat dengan mudah membiarkan budaya asing dari para imigran masuk ke Jepang. Masyarakat Jepang memiliki kekhawatiran bahwa budaya Jepang akan tersingkit dengan masuknya para imigran. Namun, realitas demografis memaksa para pembuat kebijakan untuk membela imigrasi sebagai solusi potensial, atau setidaknya faktor-faktor yang meringankan, untuk mengatasi beberapa masalah ekonomi akibat penuaan (Green, 2017).

Krisis tenaga kerja di Jepang yang semakin kronis membuat pemerintah mau tidak mau harus mengambil langkah membuka pintu imigrasi bagi tenaga kerja asing. Pada Juni 2018, Kabinet Jepang telah mengadopsi sebuah rencana ekonomi yang mana memungkinkan lebih banyak pekerja asing yang berketerampilan rendah untuk masuk ke Jepang dalam upaya untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh krisis demografi. PM Shinzo Abe berencana untuk menerima 500,000 pekerja asing hingga tahun 2025 dimana rata-rata Jepang akan menerima 71,430 pekerja per tahunnya. Di bawah rancangan rencana tersebut, pemerintah akan membuat kategori visa baru untuk visa kerja dimana dibatasi hingga lima tahun saja. Pekerja asing pun dilarang untuk membawa anggota keluarganya ke Jepang. Reformasi tenaga kerja ini merupakan solusi sementara untuk menghadapi kekurangan tenaga kerja karena pekerja diharapkan untuk kembali ke negara asalnya (Masutomo, 2018) (Siripala, 2018) (The Asahi Shimbun, 2018).

Pada tahun 2017, Ministry of Justice menghitung setidaknya ada sekitar 300,000 orang asing dengan pekerjaan di bidang khusus atau teknis, seperti profesor dan dokter. Ministry of Justice pun menemukan bahwa sekitar 9,140 orang

asing bekerja secara ilegal pada tahun yang sama, dimana hal tersebut bertanggung jawab atas dua pertiga dari pelanggaran hukum imigrasi di Jepang (Takeuchi, 2018).

World Health Organization (WHO) sendiri telah mengakui penuaan populasi atau mesyarakat lanjut usia sebagai tren global. Pada tahun 2012, harapan hidup dunia yaitu 72,7 tahun untuk wanita dan 68,1 tahun untuk laki-laki dimana angka ini enam tahun lebih lama dari pada tahun 1990. Namun, umur yang panjang masih sangat bergantung pada di mana seseorang dilahirkan, dengan faktor ekonomi memainkan peran utama. Di Jepang, laporan resmi Kantor Kabinet tahun 2014 tentang masyarakat yang menua di negara itu melaporkan bahwa pada tahun 2013 jumlah orang yang berusia 65 tahun naik 1,1 juta menjadi 33,0 juta. Ini berarti bahwa 25,9% dari total populasi negara itu dari 127,1 juta adalah penduduk usia lansia.

Kekurangan tenaga kerja yang saat ini terjadi di Jepang merupakan suatu fenomena yang disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan. Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan akan mengakibatkan permasalahan baru yang begitu terus menerus. Kekurangan tenaga kerja di Jepang ini dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh runtutan permasalahan. Permasalahan ini diawali dengan berkembangnya Jepang menjadi negara industri. Jepang yang perlahan mulai menunjukkan kekuatannya dalam bidang ekonomi tak hanya terjadi dalam sekejap. Pencapaian Jepang sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia tak luput dari masyarakat Jepang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Perkembangan Jepang sebagai negara industrialisasi ini memunculkan budaya bekerja keras pada para pekerjanya. Ketika perekonomian Jepang mulai meningkat, hal tersebut tentu berakibat pada meningkatnya biaya hidup yang harus dikeluarkan. Masyarakat pun lebih berorientasi pada pekerjaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mulai melambung. Budaya dalam

lingkungan kerja di Jepang yang lebih mementingkan seberapa lama seorang pekerja bekerja lembur pun membuat masyarakat Jepang tidak memiliki banyak waktu luang selain untuk bekerja. Hal ini pun berakibat pada fokus masyarakat yang tidak memikirkan untuk menjalin hubungan percintaan dan menikah. Permasalahan ini pun memunculkan permasalahan baru berupa rendahnya tingkat pernikahan di Jepang.

D. Sektor-sektor Pekerjaan yang Mengalami Kekurangan Tenaga Kerja

Perubahan demografi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengakibatkan terjadinya krisis tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor di Jepang. Kekurangan tenaga kerja di Jepang ini salah satunya disebabkan karena banyak tenaga kerja yang mulai meninggalkan berbagai sektor pekerjaan tersebut (Masutomo, 2018). Sektor-sektor pekerjaan yang mulai ditinggalkan dan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yaitu:

1. Sektor Layanan Kesehatan

Sektor layanan kesehatan merupakan salah satu sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Pekerjaan dalam sektor layanan kesehatan ini dapat berupa perawat (*nurse*) dan pekerja perawatan (*careworker/caregiver*). Kekurangan tenaga kerja pada sektor ini disebabkan oleh munculnya permasalahan penuaan populasi di Jepang yang sangat cepat. Permasalahan *aging population* dimana jumlah penduduk usia tua atau lanjut lebih banyak dibandingkan usia muda ikut andil dalam menambah permintaan akan tenaga kerja pada industri layanan kesehatan.

Saat ini, usia harapan hidup dan orang tua usia lanjut di Jepang cukup tinggi. Di lain sisi, generasi mudanya yang juga mengalami penyusutan jumlah dan

sangat sibuk sehingga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk merawat mereka. Pasalnya, penduduk usia tua yang tidak lagi produktif mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang melalui dana pensiun. Pemerintah Jepang lah yang merawat penduduk usia tua ini karena penduduk lansia di Jepang cenderung tidak lagi tinggal bersama anak-anaknya. Masyarakat muda di Jepang cenderung memilih untuk menempatkan para orang tuanya di pusat lansia atau panti jompo untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Banyaknya jumlah penduduk usia tua ini seharusnya diikuti dengan banyaknya jumlah perawat dan pekerja perawatan yang bertugas merawat penduduk usia tua tersebut. Namun, masyarakat di Jepang cenderung mulai meninggalkan pekerjaan ini karena beban yang ditanggung cukup tinggi, padahal gaji yang diberikan tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang berat.

Penuaan populasi di Jepang yang kian tinggi, diperkirakan pada tahun 2025, akan terjadi kekurangan sekitar 340,000 pekerja perawatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya *baby boomer* yang diperkirakan berusia 75 tahun atau lebih akan membutuhkan layanan perawatan (The Japan Times, 2018).

2. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi juga masuk dalam sektor pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja. Jepang yang ditunjuk untuk meyenggarakan *the Summer 2020 Olympics* dan *the Summer 2020 Paralympics* melakukan berbagai pembangunan yang massif untuk mensukseskan acara tersebut. Tak hanya itu, setelah bencana tsunami pada tahun 2011, pemerintah Jepang pun melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur Jepang yang rusak. Kedua hal tersebut tentu saja mendorong permintaan akan tenaga kerja pada sektor ini meningkat cukup tinggi (Sieg & Miyazaki, 2016). Sayangnya, permintaan akan tenaga kerja yang meningkat tidak didukung oleh situasi ketenagakerjaan di Jepang.

Dalam upayanya untuk mempersiapkan *the Tokyo 2020 Summer Olympics* dan *the Tokyo 2020 Summer Paralympics*, Jepang menghadapi penundaan kronis pada proyek-proyek konstruksinya di tengah kekurangan tenaga kerja terburuk dalam 40 tahun. Pada tahun 2015, sekitar 30% dari semua pekerja konstruksi berusia 55 tahun atau lebih, sementara mereka yang berusia di bawah 29 tahun hanya sekitar 10% saja (Global Construction Review Staff, 2017). Jepang yang mengalami permasalahan demografis berupa penyusutan dan penuaan populasi mengakibatkan jumlah populasi dalam usia kerja dan angkatan kerja di Jepang menurun. Hal ini membuat Jepang harus memikirkan solusi lain untuk mengatasi kekurangan akan tenaga kerja.

3. Sektor Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Jepang. Sektor ini pun mengalami kekurangan tenaga kerja yang cukup parah. Seiring berkembangnya zaman dan perindustrian Jepang yang melaju dengan cepat, membuat masyarakat cenderung melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan yang lebih menjanjikan daripada di daerah pedesaan. Banyak wilayah pedesaan yang mengalami penyusutan jumlah penduduk karena banyaknya penduduk yang bermigrasi. Daerah-daerah itu pun cenderung didominasi penduduk usia lansia dimana regenerasi berjalan dengan sangat lambat.

Lahan pertanian yang biasanya berada di wilayah pedesaan tentu saja mengalami dampak dari penyusutan jumlah populasi di daerah tersebut. Tidak adanya penduduk yang mengerjakan lahan pertanian, membuat produktivitas bahan pangan menurun. Jepang pun harus melakukan impor bahan-bahan pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Penduduk di daerah tersebut yang mayoritas berusia lanjut pun tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut tanpa bantuan dari

tenaga kerja muda. Ini lah yang membuat sektor pertanian mengalami kekurangan tenaga kerja.

4. Sektor Industri Manufaktur

Sektor industri manufaktur termasuk dalam kategori pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Adanya pemulihan ekonomi global, mendorong peningkatan produksi secara keseluruhan dimana ekspor dari barang-barang seperti autos dan chip mengalami penguatan. Namun sayangnya, banyak bisnis Jepang yang memilih untuk memproduksi barangnya kembali ke Jepang daripada memproduksinya di luar negeri. Hal ini juga disebabkan karena biaya tenaga kerja di banyak negara Asia meningkat ketika ekonomi mereka mulai berkembang. Contohnya saja, saat ini, biaya tenaga kerja per unit yang dibuat di Tiongkok 30% lebih tinggi daripada di Jepang. Kekurangan tenaga kerja di Jepang yang memburuk juga mendorong perusahaan untuk lebih banyak mempekerjakan *full-time workers* (pekerja penuh waktu) daripada *part-time workers* (pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2017, jumlah pekerja penuh waktu naik sebesar 560,000 orang, sedangkan jumlah pekerja paruh waktu hanya naik sebesar 180,000 orang. Menurut *Japan Institute for Labor Policy and Training*, pada tahun 2015, sektor manufaktur setidaknya mempekerjakan 16,7% dari tenaga kerja Jepang. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di antara negara-negara maju lainnya. Sektor industri manufaktur mengalami kekurangan tenaga kerja karena (Nikkei Asian Review, 2017)

5. Sektor Pekerjaan 3K

Jenis pekerjaan yang mulai ditinggalkan oleh tenaga kerja asal Jepang yaitu pekerjaan dengan jenis 3K. 3K sendiri memiliki arti *kitanai* (*dirty* atau kotor), *kitsui* (*demanding* atau menuntut) dan *kiken* (*dangerous* atau berbahaya). Sesuai namanya, jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang kotor, menuntut dan berbahaya. Resiko kerja yang sangat besar membuat pekerjaan

dengan jenis ini tidak lagi diminati oleh tenaga kerja Jepang. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan 3K yaitu pekerjaan membersihkan daerah yang terkontaminasi oleh radiasi. Pekerjaan tersebut jelas termasuk dalam kategori 3K dimana pekerjaan ini berhubungan dengan suatu hal yang kotor dan sangat berbahaya. Jika jenis pekerjaan ini mulai ditinggalkan oleh tenaga kerja asal Jepang, tidak akan ada orang yang mau mengerjakannya, padahal nyatanya pekerjaan ini cukup penting untuk dilakukan. Hal ini pun membuat pihak perusahaan membuka lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja pada jenis pekerjaan ini dengan gaji yang cukup rendah. Sebagai contoh, terdapat seorang pekerja asal Bolivia yang telah tinggal di Jepang selama 18 tahun hanya digaji 16,000 yen/hari dengan pekerjaan membersihkan daerah yang terkontaminasi oleh radiasi. Padahal, Kementerian Lingkungan telah menginstruksikan perusahaan yang menyediakan jenis pekerjaan seperti ini dengan gaji 25,000 yen/hari. Hal ini menunjukkan pemerintah Jepang memanfaatkan tenaga kerja asing untuk melakukan berbagai pekerjaan yang tidak diminati oleh tenaga kerja Jepang, namun digaji dengan gaji yang rendah (Brasor & Tsubuku, 2016).